

Apdesi Minta Pemkab Salurkan DBH Sesuai Undang-undang

Karawang MEDIA SINDORAYA - Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) DPD Kabupaten Karawang akan melayangkan surat kepada pemerintah daerah, terkait persentase anggran Dana Bagi Hasil (DBH) yang tidak sesuai dengan Undang-undang.

“DBH itu ada mulai tahun 2016, namun sampai saat ini anggaran yang disalurkan belum sesuai Undang-undang, hanya 7 persen, dari semestinya 10

persen,” ujar Ketua Apdesi Karawang, Sukarya WK, saat rapat kerja Apdesi di kantor sekretariat Apdesi Karawang di Kawasan Galuh Mas, Kamis (3/6/2021).

Dijelaskan WK, selama ini penggunaan anggaran dari 100 persen dipergunakan rata 60 persen dan 40 persen untuk profesional. Sementara, dalam Undang-undang Desa disebutkan DBH 10 persen, namun yang selama ini disalurkan oleh Pemkab hanya 7 persen.

“Sehingga yang 3 persen tersebut yang belum terpenuhi, dan sedang kita upayakan,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan WK, pihaknya bukan bermaksud ingin mengintervensi pemkab. Namun, DBH ini menjadi masalah krusial di ranah pemerintahan desa, dengan harapannya agar DBH dalam terpenuhi sebagaimana mestinya.

“Untuk pastinya nanti kita akan minta hearing dengan pemerintah kabupaten,” tutupnya. **(Agus Safutra)**